

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda tentang UMKM. Pendefinisian ini antara lain dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Departemen Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan juga oleh Bank Dunia. Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya (Muditomo, 2012;1).

1. Kementerian Menegkop & UKM bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. (Muditomo, 2012:1).
2. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas

tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. (Muditomo, 2012:1).

3. KepMenKeu Nomor 316/KMK.016/1994 27 Juni 1994 usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa) (Muditomo, 2012:1).
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 4 Juli 2004 yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Arief Rahmana, 2008) dalam kutipan (Muditomo, 2012:1).

B. Karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro dan Kecil

Karakteristik umum permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil masih berkisar pada kebijakan yang tidak jelas, lemahnya manajemen sumber daya manusia dan organisasi, masalah bahan baku, laporan keuangan yang tidak teratur (bahkan tidak ada), kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, dan mutu bahan baku yang rendah (Mudrajad Kuncoro, 2004;193).

Tabel 2. Analisis karakteristik dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No	Karakteristik	Permasalahan
1	<p>Iklm usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terhadap berbagai peraturan biaya/pungutan resmi dan tidak resmi, usaha mikro dan kecil lebih memiliki kemauan untuk taat dan patuh -Mempunyai ketahananana terhadap berbagai krisis karena adanya pasar yang sudah pasti 	<ul style="list-style-type: none"> -Tidak terdapat peraturan dan kebijakan yang jelas dan transparan terdapat biaya dan pungutan pada Usaha Mikro dan Kecil -Tidak mempunyai jaringan pasar yang kuat dengan indikasi kualitas yang baik dan harga yang murah
2	<p>Manajemen dan Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sejak berdiri, manajemen dan kepemilikan dipegang anggota keluarga (turun-menurun) -Mempunyai kemampuan spesifik atas produk yang dihasilkan -Untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga -Sikap hidup yang merasa kecukupan atas hasil usaha yang saat ini 	<ul style="list-style-type: none"> -Tidak adanya pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang jelas -Tidak mempunyai perencanaan organisasi yang jelas -Sulit maju dan berkembang jika tidak ada motivasi dari pemilik
3	<p>Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ketergantungan terhadap bahan baku lokal sangat tinggi -Fleksibel terhadap perubahan atau pengantian produk dihasilkan sesuai kebutuhan konsumen dan bila menguntungkan -Tidak memerlukan tingkat teknologi yang tinggi -Menggunakan tenaga kerja dalam jumlah kecil 	<ul style="list-style-type: none"> -Harga tidak tentu, ketika terdapat kelangkaan pasokan bahan baku -Produksi tidak selalu terjaga kontinuitasnya -Tingkat pendidikan pekerja relatif rendah -Terbatasnya akses pada teknologi produksi berkualitas

No	Karakteristik	Permasalahan
4	Finacial -Mengandalkan pada modal yang ada pemilik -Tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap -Tidak mau meminjam pada institusi atau personal yang mempunyai syarat terlalu rumit	-Sulit untuk melakukan pengembangan usaha yang lebih luas lagi -Laporan keuangan hanya berdasarkan perkiraan kasar pemilik -Adanya ketentuan pinjaman yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil -Tinggi nya biaya transaksi pinjaman kredit perbankan.
5	Birokrasi/perizinan -Tidak memiliki badan hukum dan merupakan bisnis keluarga	-Adanya biaya dan pungutan resmi dan tidak resmi yang membebani usaha
6	Informasi dan peluang bisnis -Mempunyai pasar yang sudah pasti atau pelanggan tetap	-Keterbatasan modal dalam mengembangkan pasar yang lebih luas
7	Efisiensi -Jarang mencapai target produksi -Biaya produksi sangat rendah	-Mengandalkan pada kemampuan tenaga kerja manusia sangat sulit dijadikan ukuran -Upah sangat rendah, karena pekerja yang berpendidikan rendah
8	Nilai tambah -Menggunakan bahan baku lokal yang dapat membuka kesempatan baru untuk sebuah usaha -Mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan -Tidak melakukan pengembangan produk secara swadaya	-Kualitas bahan baku lokal yang rendah -Lemahnya penelitian dan pengembangan atas produk yang dihasilkan

Sumber : soeratno, et al. (2001)

C. Kekuatan dan kelemahan Usaha Mikro dan Kecil

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap usaha kecil, maka strategi pengembangannya adalah memanfaatkan peluang dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha. Peluang yang

tersedia akan berdampak positif bagi kemajuan dan tumbuh kembangnya usaha mikro-kecil dengan cepat, sementara tantangan yang dihadapi harus diupayakan penyelesaiannya secara sistematis, efektif, efisien, dan optimal (Mudrajad Kuncoro, 2004:194).

Tabel 3. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Manaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah • Mempunyai ketahanan atas berbagai krisis ekonomi yang menimpa usaha • Mempunyai kemampuan spesifik dalam mengelola usaha yang dijalani • Dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi • Meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal, sehingga menciptakan peluang usaha • Sifat produksi yang padat karya, membantu pemerintah mengatasi pengangguran • Mengandalkan pada modal sendiri untuk memulai dan merintis usaha • Tidak terlalu tergantung pada pinjaman utang/kredit • Jumlah usaha mikro yang besar dan bahkan terbesar di seluruh Indonesia • Mempunyai jaringan pasar (pelanggan) yang baik selama ini • Biaya produksi yang rendah karena sifatnya kerja sama dan upah tenaga kerja dalam usaha mikro dan kecil berdasarkan hubungan keluarga • Tidak mempunyai rencana produksi yang teratur dan jelas. • Produk yang dihasilkan memberikan nilai tambah bagi perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempunyai badan hukum sehingga menjadi objek biaya dan pungutan tidak resmi • Tidak mempunyai modal yang cukup untuk tetap bertahan dengan usaha yang dijalani, sehingga harus beralih ke usaha lain • Tidak mempunyai perencanaan untuk mengembangkan usaha lebih maju • Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah • Ketersediaan dan kualitas bahan baku lokal masih kurang memadai dibanding bahan baku impor • Tingkat keahlian pekerja yang masih kurang dan rendah • Tidak mampu berkembang dengan cepat karena keterbatasan modal • Perkembangan usaha tidak dapat dilacak, karena tidak memiliki konsep dan strategi pemasaran • Tidak mempunyai badan hukum, sehingga sukar diperoleh informasi yang tepat. • Tidak mampu mengelola pasar yang sudah ada efektif dan efisiennya, karena tidak memiliki konsep dan strategi pemasaran. • Sulit mencapai target produksi yang diinginkan dalam meningkatkan target penjualan • Kinerja produksi sulit diukur karena tidak ada pembandingan • Tidak melakukan pengembangan atas produk yang telah dihasilkan.

Sumber : soeratno, et al. (2001)

D. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro dan Kecil

Identifikasi dan pemilihan prioritas apa yang akan diambil tergantung pada analisis situasi yang akan dihadapi pihak pembuat kebijakan. Beberapa indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk dapat menentukan industri kecil unggulan. Sebagai indikator tersebut adalah banyaknya unit usaha, produktifitas tenaga kerja, nilai tambah penyerapan tenaga kerja, dan kategori potensial untuk ekspor atau tidak (Mudrajad Kuncoro, 2004;194).

Tabel 4. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro dan Kecil

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat kebijakan yang lebih adil dan transparan bagi semua usaha yang bergerak di sektor apapun • Membantu usaha dan upaya pemerintah dalam membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi • Meningkatkan kompetensi lokal dan nasional atas produk-produk unggulan yang berkualitas dan dapat bersaing dengan produk luar • Memudahkan melakukan berbagai kebijakan baru yang berhubungan dengan usaha pemulihan, perubahan, dan peningkatan kebijakan ekonomi • Menyediakan dan membuka lapangan usaha dan kerja baru bagi masyarakat • Mengatasi masalah pengangguran yang menjadi beban pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak peraturan hukum disemua jenis sektor usaha secara adil dan proporsional tanpa melakukan diskriminatif • Meyediakan dana dalam jumlah yang relative besar bagi pengembangan usaha ini agar konsisten menjalankan usaha • Menegakkan budaya formal-institusional dalam organisasi usaha mikro dan kecil yang menjalankan organisasi usaha secara tradisional • Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pengetahuan kepada pemilik dan pekerja usaha mikro dan kecil • Membuat kebijakan yang melindungi usaha mikro dan kecil dengan menjamin pasar lokal dari masuknya produk non lokal • Meyediakan para penyidik yang mempunyai kualitas dan kapabilitas yang memadai dibidangnya

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dorongan akselerasi kemandirian terhadap ketergantungan financial/utang pada pihak luar negeri • Dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam membantu masalah pendanaan usaha yang dikelola • Tumbuhnya usaha mikro dan kecil secara cepat dan merata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat • Dapat membentuk jaringan pasar yang lebih luas secara lokal maupun regional • Meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih mencerminkan komponen biaya proses produksi dan hasil produksi yang lebih rill • Melakukan kerja sama produksi antara usaha besar dengan usaha mikro dan kecil untuk memenuhi permintaan • Memperbanyak jenis-jenis produksi yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil dalam suatu industri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan fasilitas institusional dan prosedural pinjaman dana usaha ini terhadap lembaga perbankan • Melakukan usaha dan upaya pendidikan dan pelatihan pelaporan atas usaha yang dikelola dan manfaatnya • Mempermudah usaha dan upaya untuk memiliki dan hokum usaha melalui kebijakan yang adil dan transparan • Membentuk lembaga pengembangan produk yang menyediakan fasilitas dan informasi pasar yang dapat membuka peluang secara lebih luas dan beragam • Membuat kebijakan yang menetapkan system dan modal pengupahan yang adil dan wajar bagi bagi setiap pelaku ekonomi • Membuat kebijakan yang memprioritaskan peningkatan produksi terhadap produk-produk usaha mikro dan kecil dalam suatu industry • Menyediakan dana atau anggaran untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam penelitian dan pengembangan produk •

Sumber : soeratno, et al. (2001)

E. Teori Ekonomi Kelembagaan

Dalam kajian historis akar dari Teori Kelembagaan sendiri sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, terutama ahli kelembagaan dari tradisi AS (*American Institutional Tradition*) seperti: Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John R.

Commons, dan Clarence Ayres. Di samping itu, ada juga varian lain yang melekat pada ekonomi klasik semisal, Adam Smith dan John Stuart Mill; Karl Marx dan aliran Marxian lainnya; mazhab Austria seperti Menger, Von Wieser, dan Hayek; Schumpeter; dan tokoh Neoklasik khususnya Marshall. Tradisi yang pertama (American institutional tradition) kemudian dikenal sebagai “Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama” (*old institutional economics*), sedangkan yang berikut umumnya dipandang sebagai kelanjutan dan perluasan bagi elemen-elemen kelembagaan yang ditemukan dalam aliran Ekonomi Klasik, Neoklasik, Mazhab Austria; biasanya disebut sebagai “Ilmu Ekonomi Kelembagaan Baru” (*New institutional economics*). Penggunaan istilah “lama” dan “baru” tidak berarti yang lama telah mati atau tidak aplikatif lagi, melainkan lebih kepada konteks pembedaan tradisi berpikir dan konsentrasi isu (Erani, 2012:24).

Tabel 5. Ikhtisar Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan

Elemen	Ekonomi Neoklasik	Ekonomi kelembagaan
<ul style="list-style-type: none"> -Pendekatan -Satuan observasi -Tujuan individu -Hubungan dengan ilmu social lain -Konsep nilai -Konsep ekonomi -Falsafah -Tingkah laku social -Postulat -Focus -Metode ilmiah -Data -System -Ekonometrika -Visi ekonomi -Peranan -Sikap terhadap kegiatan kolektif -Tokoh 	<ul style="list-style-type: none"> -Matrealistik -Komoditas dan harga Diri sendiri -Hanya ilmu ekonomi -Nilai dalam pertukaran -Mirip ilmu-ilmu alam -Pra-Dewey -Percaya -Keseimbangan -Sebagian -Hampir pasti positif -Kebanyakan kuantitatif -Tertutup -Dipakai secara baik -Mengarrah ke statis -Memberikan pilihan -Melawan -Adam Smith, Alfred Marshall 	<ul style="list-style-type: none"> -Idealistik -Transaksi Diri sendiri dan orgn lain -Hampir semua ilmu sosial -Nilai dalam penggunaan -Pendekatan budaya -Pasca-Dewey -Behaviorist -Ketidakseimbangan -Keseluruhan -Kebanyakan normative -Kebanyakan kualitatif Terbuka -Tidak/kadang di pakai -Lebih kearah dinamis -Merekomendasi Pilihan -Tidak dapat dihindari -Thorstein Veblen, John R.Commons

Sumber : paarlberg, 19 93; Arifin 2005:19 dalam Erani 2012

Hal ini berarti bahwa kegiatan ekonomi merupakan transaksi manusia yang beroperasi pada dua level. *Pertama*, pengembangan dan spesifikasi kelembagaan. *Kedua*, kegiatan ekonomi yang mencakup interaksi manusia didalam kelembagaan yang sudah tersedia. Jika yang pertama menyangkut aturan main (*rules of the game*), maka yang kedua adalah permainan (*game*) itu sendiri (Pejovich, 1995:30) dalam (Erani, 2012;31). Hampir seluruh ilmuwan sosial setuju bahwa pemahaman terhadap kelembagaan merupakan hal yang kritikal untuk dapat memahami pembangunan Ekonomi dan mengidentifikasi kinerja ekonomi dari sebuah perekonomian seperti yang dikemukakan oleh Alston (1996:25), dalam (Erani, 2012;31).

1. Ekonomi Kelembagaan Baru

Pada saat ini para ekonom memberikan perhatian besar kepada seperangkat ide yang kemudian dikenal dengan istilah “ekonomi kelembagaan baru” (*New Institutional Economics/ NIE*). Secara garis besar NIE merupakan perlawanan terhadap dan sekaligus perkembangan ide ekonomi neoklasik. Menurut Williamson sendiri, istilah NIE digunakan untuk memisahkan dengan istilah lain, yakni *OIE (old institutional economics)*, yang dipelopori oleh Commons dan Veblen Kherallah dan Kirsten, 2002;2; Coase, 1998:72; Nabli dan Nugent, 1989:3) dalam (Erani, 2012;34).

Oleh karena itu, NIE mencoba memperkenalkan pentingnya peran dari kelembagaan, namun tetap berargumentasi bahwa pendekatan ini bisa di pakai dengan menggunakan kerangka ekonomi neoklasik. Dengan kata lain dibawah NIE beberapa asumsi yang tidak realistis dari neoklasik (seperti informasi yang

tidak sempurna, tidak ada biaya transaksi, dan rasionalitas yang lengkap) diabaikan, tetapi asumsi individu yang berupaya untuk mencari keuntungan pribadi untuk memperoleh kepuasan maksimal tetap diterima. Selibhnya, kelembagaan dimasukkan sebagai rintangan tambahan di bawah kerangka kerja NIE (Kherallah dan Kirsten, 2002:2) dalam (Erani, 2012;35).

Penting juga dicatat bahwa NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan (*level makro*) dan kesepakatan kelembagaan (*level mikro*).

Wiliamson mendeskripsikan lingkungan kelembagaan (*level makro*) ini sebagai seperangkat struktur aturan politikal, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Aturan mengenai tata cara kepemilikan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontak merupakan beberapa contoh dari lingkungan/kebijakan ekonomi. Sebaliknya, *level mikro* berkuat dengan masalah tata kelola kelembagaan. Singkatnya merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antar unit tersebut bisa berlangsung, baik lewat kerjasama maupun kompetisi. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan *level mikro* karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah (Tian, 2001:387; Kherallah dan Kirsten, 2001:4; Groenewegen, *et. al.*, 1995:5) dalam (Erani, 2012:36).

Secara eksplisit, Acemoglu dan Robinson (2012:74-76) dalam (Erani 2012 : 38) menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan sumber penting yang menentukan suatu Negara/bangsa gagal atau maju perekonomiannya. Negara yang

kelembagaannya mapan dan inklusif (*inclusive economic institutions*) cenderung kinerja ekonominya bagus. Negara ini ditandai oleh kepemilikan hak privat yang aman, sistem hukum yang tidak bias dan penyediaan layanan publik yang luas. Sebaliknya Negara yang kelembagaannya buruk atau ekstraktif (*extractive economics institutions*) mempunyai kinerja ekonomi yang jelek, misalnya pertumbuhan ekonomi yang tidak berlanjut, produktivitasnya rendah, dan kesejahteraan ekonominya terbatas. Disebut ekstraktif karena peningkatan kesejahteraan/pendapatan oleh salah satu orang/kelompok diperoleh dengan cara menghisap kesejahteraan/pendapatan orang/kelompok lain. Karakteristik ini antara lain terjadi di Zimbabwe, Korea Utara, Argentina dan Kolombia. Dalam jangka panjang kelembagaan tidak berhenti hanya menjadi fasilitator bagi pencapaian investasi dan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Tugas terpenting dari kelembagaan adalah menciptakan pasar (*market-creating*) yang bisa melindungi hak kepemilikan dan melaksanakan kontrak.

2. Definisi Kelembagaan

Menurut Vablen dalam (Erani, 2012:26) kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subjek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Pembangunan adalah suatu proses pengembangan kelembagaan akibatnya diperlukan perencanaan sistem dan kelembagaan yang mampu mengelola proses pembangunan. Secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat.

3. Karakteristik dan Ciri Kelembagaan

3.1 Karakteristik kelembagaan

Sebagai abstraksi, Challen (2000:13-14) dalam (Erani 2012) mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan, yakni:

- (a) Kelembagaan secara sosial di organisasi dan didukung (scott, 1989), yang biasanya kelembagaan membedakan setiap rintangan-rintangan atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis dan rintangan fisik.
- (b) Kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal serta tata perilaku [North, 1990].
- (c) Kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipadu maupun dihalangi.
- (d) Kelembagaan juga mengatur larangan dan persyaratan-persyaratan [North, 1990].

3.2 Ciri kelembagaan

Menurut Acemoglu, 2003:27 dalam (Erani 2012:37) Kelembagaan yang baik dicirikan oleh tiga hal berikut:

- (a) pemaksaan terhadap hak kepemilikan. Adanya hak kepemilikan dalam masyarakat akan memberi insentif bagi para individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, misalnya investasi;
- (b) Membatasi tindakan-tindakan politisi, elite, dan kelompok-kelompok berpengaruh lainnya yang berupaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa prosedur yang benar, seperti perilaku mencari rent;
- (c) Memberi kesempatan yang sama bagi semua individu untuk

mengerjakan aktivitas ekonomi/investasi, khususnya dalam meningkatkan kapasitas individu maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

F. Fungsi dan Peran Kelembagaan Pemerintah

1. Fungsi

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah) memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai :

- a) Fungsi stabilisasi , yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, social politik, hokum, pertahanan, dan keamanan;
- b) Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon;
- c) Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

2. Peran

Pengertian Peranan Menurut (Soekanto, 1990:3), peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Peranan pemerintah terlibat dalam lima wujud utama , yaitu pertama, selaku

stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus dimainkan secara efektif. Kedua, selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Ketiga selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk mengiringi masyarakat kearah kehidupan yang modern. Keempat selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi masyarakat. Kelima, selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan menurut Siagian (2012:142-149).

Peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun distrik secara spesifik menurut Tambunan (2002, h.146) adalah pertama, Implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat. Kedua, formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM, termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program dan fasilitas-fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga, koordinasi dan integrasi dari perencanaan, program, dan aktivitas-aktivitas pengembangan KUKM. Keempat, Peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan-kegiatan KUKM. Kelima, Penyiapan laporan-laporan, syarat-syarat dan rekomendasi-rekomendasi terhadap implementasi dari langkah-langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

3. Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah pasal 1 ayat 8 menyatakan

pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pendekatan pemberdayaan dapat dicapai melalui 5P menurut Suharto (2009:67), yaitu pertama, pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Kedua, penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Keempat, penyokongan, pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Kelima, pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan

prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat (Mohammad JF, 2004) dalam (Darwanto, 2008:28).

G. Strategi Pembinaan UMKM

Menurut Mudrajad Kuncoro, 2004;15;307, strategi pembinaan yang telah diupayakan selama ini dapat di klasifikasikan dalam :

- 1) Aspek manajerial, meliputi : peningkatan produktifitas/omzet/tingkat utilitas/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Aspek peemodalan, meliputi : bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari potofolio kredit Bank) dan kemudahan kredit (KUPEDE, KUK, KIK, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).
- 3) Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem bapak-anak angkat, PIR, keterkaitan hulu hilir, keterkaitan hilir-hulu, modal ventura, ataupun subkontrak.
- 4) Pengembangan sentra industry kecil dalam suatu kawasan berbentuk PIK (pemukiman industry kecil), LIK (lingkungan industri kecil), SUIK (sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (unit pelayanan teknis) atau (tenaga penyuluhan industri).
- 5) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (kelompok usaha bersama), KOPINKRA (koperasi industry kecildan kerajinan).

H. Pengembangan Kelembagaan dan UMKM

Hal-hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UKM yaitu, *pertama*, penciptaan iklim yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif. *Kedua*, bantuan permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM. *Ketiga*, perlindungan Usaha, jenis-jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang terutama usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan. *Keempat*, pengembangan kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. *Kelima*, pelatihan, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. *Keenam*, membentuk lembaga khusus, perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan. *Ketujuh*, menetapkan asosiasi, asosiasi yang telah ada diperkuat. *Kedelapan*, mengembangkan promosi, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. *Kesembilan*, mengembangkan kerjasama setara, perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) (Hafsah 2004:34).

Menurut (Darwanto, 2008) Tugas utama negara terkait dengan UKM adalah fungsi pengaturan atau *regulatory* serta pemberdayaan secara selektif. Dalam hal pembangunan UKM fokus perhatian sebaiknya ditujukan pada:

1. Penertiban administrasi badan hukum UKM;
2. Menata pengawasan pengesahan badan hukum UKM baru;
3. Menyelenggarakan akreditasi atau penilaian badan hukum UKM secara teratur dan berlanjut sebagai bentuk perlindungan publik;
4. Memperkuat lembaga pengembangan SDM gerakan koperasi;
5. Memperkuat lembaga keuangan UKM dengan mempersiapkan kelembagaan simpan pinjam untuk UKM;
6. Perkuatan permodalan dilakukan selektif dan diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan UKM.

Tabel 6. Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil

Lembaga	Peran yang dilakukan	Program atau intervensi
1. Pemerintah 1.1 Deperindag	a. Perumusan kebijakan pengembangan implementasi program, dan penyediaan fasilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan • Penelitian dan pengembangan teknologi produksi • Pelayanan teknis melalui UPT • Pelayanan informasi dan konsultasi Perantara UK • dengan Bapak Angkat
1.2 Depdiknas	a. Peningkatan SDM melalui semua jalur: formal, informal, dan nonformal b. Konsep link and match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Program magang • Pelatihan melalui pendidikan masyarakat • Pembinaan kursus-kursus informal Perhatian terfokus

Lembaga	Peran yang dilakukan	Program atau intervensi
<p>1.3 Depnaker</p> <p>1.4 Depsos</p> <p>1.5 Depkeu</p>	<p>c. Orientasi pendidikan sangat bias</p> <p>a. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja</p> <p>b. perumusan kebijakan ketenagakerjaan</p> <p>a. pembinaan UK sebagai bagian pengentasan kemiskinan</p> <p>a. merancang kebijakan ekonomi yang kondusif bagi pengembangan UK</p> <p>b. Mekanisme control terhadap implementasi kebijakan yang telah diambil masih sangat minimal</p> <p>c. Control pelayanan finansial bagi UK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pada usaha • Menengah-besar-formal, belum ada program yang berorientasi pada UK. • Pelatihan melalui BLK • Pengembangan pusat informasi • Penetapan KUM dan pemantauan • Pengembangan usaha kecil dan usaha mandiri lebih ditujukan mengatasi pengangguran ketimbang pengembangan usaha itu sendiri. • Pelatihan – pelatihan • Pembentukan dan pembinaan UK antara lain 1-5% dana keuntungan BUMN • Penyederhanaan prosedur pelayanan financial
<p>2. Lembaga swasta dan perorangan</p> <p>3. LSM</p>	<p>a. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan latihan</p> <p>a. Lembaga pelayanan alternative bagi UK yang berfungsi sebagai lembaga perantara untuk menjembatani keterbatasan pemerintah dan swasta dalam menjangkau UK</p> <p>b. Sangat berpotensi menjadi partner UK karena kedekatan hubungannya dengan UK</p> <p>c. Koordinasi antar LSM maupun lembaga pendukung lainnya</p> <p>d. Lingkup kerja terbatas, serta ada ketergantungannya financial dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM • Perantara dalam pasar • Pengembangan berbagai kelompok swadaya masyarakat • Pelatihan teknis produksi dan pengolahan/administrasi • Penelitian dan konsultasi • Intervensi efektif hanya dalam wilayah kerja

4. Lembaga penelitian di perguruan tinggi negeri	teknisi ahli yang akan mengancam e. keberlanjutan lembaga a. Penelitian dan pengembangan teknologi, produksi, dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum menjangkau kelompok UK yang betul-betul marginal • Pengembangan skema pelayanan
5. Asosiasi pengusaha kecil	a. Idealnya asosiasi seperti ini terlibat langsung dalam negosiasi, perumusan, kebijakan, pemantauan, dan evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan teknis manajemen untuk pedagang kecil • Konsultasi dan pembinaan • Pengorganisasian usaha kecil harus dibangun dengan tujuan yang spesifik dan dikaitkan dengan pemberdayaan. • Distribusi informasi

Sumber : sjaifudian, et al. (1995: 62-63) dalam Mudrajat Kuncoro (2004)

I. Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Pembangunan

Pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijaksanaan pokok dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), yaitu : (1) peningkatan kualitas hidup seperti rohani, jasmani dan kejuangan maupun kualitas permukiman dan perumahan yang sehat; (2) peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam pemanfaatan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan

lingkungan; serta (4) pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM. (Mulyadi, 2003:2)

Secara umum peningkatan produktifitas tenaga kerja dilakukan dengan peningkatan kemampuan/keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kerativ dan inovatif, dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja di arahkan kepada pengembangan usaha mandiri dan professional, sehingga dapat berkembang menjadi kader wirawasta yang mampu menciptakan lapangan kerja. (Mulyadi, 2003:3)

1. Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru dimulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.. (Mulyadi, 2003:4).

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan salah satu kunci manajemen tenaga kerja, merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang tidak dilaksanakan secara sembarangan. Artinya, agar efektivitas dan pendidikan dapat terjamin, perlu adanya penanganan yang serius dan baik yang menyangkut sarana maupun prasarana sehingga meningkatkan keahlian dan prestasi kerja karyawan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan dua hal yang hampir sama maksud pelaksanaannya, namun ruang lingkup yang membedakannya.

Menurut Dr. B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005,hal :199) pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka.

Menurut Simanjuntak (1985:32), pelatihan kerja melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Pada dasarnya pelatihan melengkapi pendidikan. Pendidikan hanya bersifat umum, sedangkan latihan bersifat khusus dan teknis oprasional. Selain itu Simanjuntak (1985:58) menjelaskan juga bahwa latihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian akan meningkatkan produktivitas kerja.

Menurut Simamora (2004:273) menjelaskan dalam bukunya bahwa pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan untuk menunaikan pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik, dan menjelaskan bahwa pelatihan mempunyai fokus yang

agak sempit dan harus memberikan keahlian yang bakal memberikan manfaat bagi organisasi secara cepat.

3. Manfaat dan Dampak Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Manfaat dan dampak yang diharapkan dari penyelenggaraan Diklat bagi karyawan/relawan suatu perusahaan/organisasi meliputi :

a) Peningkatan keahlian kerja

Meningkatkan keahlian bekerja tidak hanya terbatas melalui Diklat saja tetapi kebiasaan untuk melakukan tugas dan kebiasaan secara rutin pada setiap waktu dalam suatu tugas atau pekerjaan juga merupakan sarana positif untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja.

b) Pengurangan Keterlambatan Tenaga Kerja

Berbagai alasan seringkali muncul dari tenaga kerja atas tindakan yang mereka lakukan meskipun sering sekali alasan itu tidak masuk akal, misalnya keterlambatan kerja karena faktor tempat tinggal, gangguan lalu lintas di perjalanan dan sebagainya.

c) Mengurangi Timbulnya Kecelakaan Kerja, Kerusakan Alat/Bahan inventaris organisasi atau perusahaan sebagai penunjang aktivitas kerja. Kecelakaan bekerja itu biasanya timbul atas kelalaian karyawan/relawan ataupun pihak perusahaan/organisasi, ketidaktahuan tenaga kerja tentang keselamatan kerja dan penggunaan peralatan didalam suatu pekerjaan.

d) Peningkatan Produktifitas Kerja

Tujuan setiap perusahaan/organisasi adalah memperoleh tingkat produktifitas tinggi, setiap proses mengalami setiap peningkatan sesuai dengan yang

diharapkan. Untuk memperoleh hal tersebut didukung beberapa faktor diantaranya adalah kondisi kerja para tenaga kerja. Peningkatan jumlah karyawan dan pendapatan perusahaan. Apabila tenaga kerja tidak memiliki gairah dan semangat bekerja, tentu produktifitas seperti peningkatan pendapatan dan produksi output akan merosot atau rendah. Sebaliknya, apabila tenaga kerja memiliki semangat dan gairah kerja tinggi keluaran (produktifitas kerja) akan tinggi pula.

e) Peningkatan Kecakapan Kerja

Perkembangan teknologi dan komputerisasi yang makin maju, menuntut tenaga kerja harus mampu menggunakannya. Untuk itu, tenaga kerja dituntut mengembangkan kemampuan dan kecakapan kerjanya baik secara manual maupun teknologi.

f) Meningkatkan Rasa Tanggung jawab

Masing-masing tenaga kerja sebenarnya memiliki tanggung jawab, hanya tingkatan dan kebutuhannya berbeda-beda bergantung pada beban tugas dan pekerjaan yang diserahkan padanya. Yang dimaksud tanggung jawab disini adalah kewajiban seorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makin tinggi *hierarki* perusahaan/organisasi makin besar tanggung jawab yang diserahkan kepadanya.

J. Pembangunan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan

(Todaro:2006). Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi (Bhinadi:2003).

K. Profil Usaha Kecil di Indonesia

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Kelembagaan Manajemen FE UI tahun 1987 dalam (T.S. Partomo, 2004:4) dapat dirumuskan profil usaha kecil di Indonesia sebagai berikut:

1. Hampir setengahnya dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang;
2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan;
3. Masalah utama yang dihadapi:
 - a) Sebelum investasi masalah: permodalan, kemudahan, usaha (lokasi, izin);
 - b) Pengenalan usaha: pemasaran, permodalan, hubungan usaha;
 - c) Peningkatan usaha: pengadaan barang/bahan;
4. Usaha menurunkan usaha: kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis, dan administrasi;
5. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran;

6. 60% menggunakan teknologi tradisional;
7. 70% melakukan pemasaran langsung ke konsumen;
8. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dipandang terlalu rumit dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan.

L. Penelitian Terdahulu

1. Abdullah Abidin, S.E.(2008) judul: **Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah** metode yang digunakan analisis deskriptif hasil kesimpulan *Pertama*; potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. *Kedua*, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. *Ketiga*, Sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. *Keempat*, peranan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. *Kelima*; Sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika disain dan *strategi replikasi* yang meliputi kerjasama jaringan (*network*) pemerintah, LSM, lembaga swasta dan individu maupun kelompok di kelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.
2. Irdyanti (2012) Judul **Peran Pemerintah dalam Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor Studi Kasus: Klaster Kasongan dalam Rantai Nilai**

Tambah Global metode yang digunakan deskriptif analisis kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa klaster industri kerajinan gerabah Kasongan telah banyak melakukan perkembangan, namun perkembangan ini belumlah dapat dikatakan berjalan secara menyeluruh, melainkan terhadap pada aspek-aspek tertentu saja (bersifat parsial). Meski telah melakukan strategi *upgrading* namun strategi ini dianggap belum berhasil dalam mereposisi UKM dalam rantai nilai. *Kedua*, program yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan rente yang dihadapi klaster Kasongan dalam rantai GVC, hal ini terkait dengan pelaksanaan program yang kurang maksimal karena masih ditemukannya kekurangan dalam proses sinergi.

3. Darwanto Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (2007) judul **Membangun Daya Saing UKM Dalam Perekonomian Nasional** Metode Penelitian dan penulisan paper ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang telah ada. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang merupakan data yang dikeluarkan oleh BPS. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan kepustakaan analisis. Kesimpulan peran UKM sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi

sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

4. Ali Sadikin Wear (2012) **Peran Pemerintah Daerah Dalam**

Pemberdayaan UKM. Metode yang di gunakan tipe penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Pemerintah daerah dapat memanfaatkan UKM untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah malalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional.

Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Dalam hal ini pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai UKM bisa dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat mendorong agar UKM membangun kemitraan dengan usaha besar dalam semangat saling menguntungkan. Pemda harus mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah mereka masing masing.. Dengan demikian, pendekatan pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan khususnya dalam rangka pembinaan UKM.

5. Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi, Abdul Juli Andi Gani, Abdullah Said
judul **Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pmberdayaan Usaha**

Kecil Menengah Kota Malang (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang) . Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Kesimpulan Pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang masih belum berjalan maksimal dan merata. Sebagian UKM yang telah tergabung di Paguyuban Amangtiwi tersebut sudah tergolong UKM yang telah berdaya, akan tetapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini dalam melakukan pemberdayaan lebih berfokus pada UKM yang tergabung dalam Paguyuban Amangtiwi dan UKM yang tidak tergabung dalam Paguyuban seperti terabaikan. Sementara itu, Faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM adalah adanya struktur organisasi yang terintegrasi pada Dinas Koperasi dan UKM, adanya paguyuban Amangtiwi yang menaungi UKM, kesadaran pelaku UKM untuk bergabung dengan Paguyuban Amangtiwi, pembentukan Koperasi Amangtiwi, pemanfaatan teknologi *e-business*, dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM adalah keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang dimiliki, kesulitan permodalan UKM, dan permasalahan teknis UKM.